

PERGANTIAN KEPEMIMPINAN DI RRC

Budi S. SATARI*

PENDAHULUAN

Masalah kepemimpinan di Cina adalah suatu masalah politik yang serius baik di masa sebelum maupun sesudah berkuasanya kaum komunis. Sejak berdirinya negara RRC pada tahun 1949, perebutan kekuasaan di kalangan pemimpin Partai Komunis Cina sering menyebabkan perubahan keadaan politik yang mengakibatkan terhambatnya produksi dan menimbulkan kekacauan di bidang ekonomi. Peranan pribadi Mao Zedong dalam politik RRC, terutama pada masa Revolusi Kebudayaan di tahun 1960-an, menambah kacaunya politik RRC dan akibatnya masih terasa dalam politik RRC dewasa ini.

Dengan meninggalnya Mao pada tahun 1976, masalah kepemimpinan RRC itu kembali menjadi masalah utama, karena timbul pertentangan antara kelompok "ahli waris" Revolusi Kebudayaan (dipimpin oleh Hua Guofeng) dan kelompok "korban" Revolusi Kebudayaan (dipimpin oleh Deng Xiaoping) yang bersaing untuk memimpin negara itu. Perbedaan pendapat antara kedua kelompok itu menyangkut perbedaan pandangan politik dan juga alasan-alasan pribadi yang merupakan kelanjutan dari usaha perebutan kekuasaan yang telah berlangsung sejak sebelum Revolusi Kebudayaan.

Dalam Sidang ke-3 Kongres Rakyat Nasional ke-5 yang diselenggarakan pada bulan September 1980 yang lalu, PM Hua Guofeng, Wakil PM Deng Xiaoping, dan beberapa tokoh senior lainnya telah mengundurkan diri dari jabatan mereka masing-masing dan menyerahkan jabatan tersebut kepada para tokoh yang lebih muda. Dalam Kongres Nasional Partai Komunis Cina yang ke-12 yang akan diadakan pada bulan Mei atau Juni tahun 1981 ini diduga Hua juga akan melepaskan jabatannya sebagai Ketua PKC. Tulisan ini

* Staf CSIS

akan mencoba membahas pergantian kepemimpinan di RRC itu serta pengaruhnya terhadap kehidupan politik dalam negeri RRC dan terhadap per-caturan politik internasional.

I. PEREBUTAN KEKUASAAN DALAM POLITIK RRC

Seperti telah dikatakan di atas, perebutan kekuasaan di kalangan pemimpin PKC merupakan bagian dari kehidupan politik di RRC sejak berdirinya negara itu. Pada tahun 1950-an, pada saat RRC memulai pembangunan ekonominya, perbedaan pendapat antara golongan moderat (di bawah pimpinan PM Zhou Enlai) dan golongan radikal (Maois) tentang cara pelaksanaan pembangunan itu sering menimbulkan kekacauan politik yang mengakibatkan macetnya pelaksanaan program pembangunan itu.

Campur tangan Mao Zedong secara pribadi dalam politik RRC memperkuat kedudukan kaum radikal yang mengutamakan politik di atas segalanya sesuai dengan ajaran-ajaran Mao. Sejak kampanye "Melompat Jauh ke Depan" sampai berakhirnya Revolusi Kebudayaan pada awal 1970-an, Mao Zedong dan para pengikutnya berhasil menguasai kehidupan politik di RRC. Mereka berhasil menyingkirkan lawan-lawan politik mereka dengan serangkaian demonstrasi dan tindakan-tindakan kekerasan. Beberapa tokoh moderat, seperti Liu Shaoqi dan Deng Xiaoping, diberhentikan dari jabatannya. Sementara itu tokoh-tokoh lain dikecam melalui poster-poster, selebaran-selebaran dan penerbitan-penerbitan Pengawal Merah. Setelah Revolusi Kebudayaan berakhir, banyak tokoh-tokoh politik korban Revolusi Kebudayaan itu direhabilitasi dan diangkat kembali untuk menduduki jabatan-jabatan penting, baik dalam pemerintahan maupun dalam kepemimpinan PKC. Di antara tokoh-tokoh yang direhabilitasi itu adalah Deng Xiaoping yang diangkat sebagai Wakil PM merangkap Wakil Ketua PKC dan anggota Komite Tetap Politbiro PKC. Pengangkatan Deng Xiaoping itu ditetapkan dalam Kongres Rakyat Nasional ke-4 yang diselenggarakan pada awal tahun 1975.¹ Deng Xiaoping adalah calon kuat yang diharapkan dapat menggantikan PM Zhou Enlai. Tetapi, Deng juga merupakan lawan utama kelompok radikal yang dipimpin oleh Jiang Qing. Pertentangan antara kelompok radikal dan kelompok moderat dalam menentukan kebijakan politik dalam dan luar negeri di negara itu kelihatan semakin jelas pada tahun 1975. Sementara itu pertikaian antar golongan dan pemogokan-pemogokan kaum buruh juga memperburuk keadaan di negara itu.

Setelah PM Zhou meninggal pada bulan Januari 1976, terjadi lagi kekacauan politik karena kelompok radikal yang dipimpin oleh Jiang Qing,

¹ Soedibjo, ed., *Indonesia dan Dunia Internasional 1976* (Jakarta: CSIS, 1977), hal. 526

Wang Hungwen, Yao Wanyuan dan Zhang Chungqiao (kemudian dikenal sebagai "Kawan Empat") menentang Deng dan menuduhnya sebagai anti-Mao dan penganut kapitalisme. Sebagai kompromi dan atas desakan Mao, diangkatlah Hua Guofeng sebagai pejabat PM RRC.¹

Pada bulan April 1976, ribuan penjiarah makam Zhou Enlai mengadakan demonstrasi besar-besaran di lapangan Tien An Men. Mereka membawa poster-poster yang isinya mengecam kelompok penentang Deng. Kejadian itu menyebabkan dipecatnya Deng dari semua jabatannya, dan atas usul Mao, Komite Sentral PKC mengangkat Hua menjadi PM RRC dan Wakil Ketua I PKC.² Dengan demikian, kelihatannya kelompok Maois yang radikal berhasil memperkuat kembali kedudukan mereka dalam politik RRC. Tetapi, hal itu tidak berlangsung lama. Setelah Mao Zedong meninggal pada pertengahan tahun 1976, "Kawan Empat" beserta para pengikutnya ditangkap dengan tuduhan berusaha melakukan kudeta dan menentang pengangkatan Hua Guofeng sebagai Ketua PKC menggantikan Mao.³ Dengan jatuhnya "Kawan Empat" itu, Deng Xiaoping direhabilitasi kembali, dan diangkat kembali untuk menduduki semua jabatan yang pernah dipegang sebelum pemecatannya pada bulan April 1976 itu.

Setelah kaum moderat di bawah pimpinan Deng mulai memperoleh kedudukan yang kuat dalam politik RRC, maka kebijakan pemerintah lebih ditekankan pada usaha modernisasi dalam empat bidang, yaitu pertanian, pertahanan, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan industri. Dalam perkembangan politik, terlihat pula adanya usaha deMaoisasi politik RRC antara lain dengan jalan memisahkan kekuasaan partai dan pemerintahan. Usaha kelompok Deng untuk mendeMaoisasikan politik RRC ini mendapat tentangan dari kelompok Hua yang dalam hal ini didukung oleh kelompok netral yang dipimpin oleh Ye Jianying.⁴ Setelah meninggalnya Mao dan setelah jatuhnya "Kawan Empat", RRC dipimpin oleh 3 kelompok politik yang adalah sebagai berikut:

- a. kelompok "ahli waris" Revolusi Kebudayaan yang dipimpin oleh Hua Guofeng,
- b. kelompok "korban" Revolusi Kebudayaan yang dipimpin oleh Deng Xiaoping,
- c. kelompok netral yang dipimpin oleh Ye Jianying.

1 Soedibjo, ed., *Indonesia dan Dunia Internasional 1977* (Jakarta: CSIS, 1978), hal. 494

2 *Ibid.*, hal. 496

3 *Ibid.*, hal. 498

4 Chang Chen-pang, "Divergences Between Yeh and Teng", *Issues & Studies*, Vol. XVI, No. 7, July 1980, hal. 1

Kelompok netral ini mencoba untuk mempertahankan kepemimpinan yang merupakan gabungan antara pragmatisme Zhou Enlai dan semangat revolusioner Mao. Dengan kata-kata lain, kelompok netral ini menginginkan terlaksananya program modernisasi di bawah panji-panji Mao. Deng menginginkan agar kesalahan-kesalahan Mao dinilai kembali secara mendalam. Menurut Deng, hal itu perlu dilakukan untuk mencegah terulangnya kembali kesalahan-kesalahan seperti itu di masa mendatang. Sehubungan dengan usaha deMaoisasi itu, tokoh-tokoh yang pernah dihukum oleh Mao, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, telah direhabilitasi.

II. PERGANTIAN KEPEMIMPINAN RRC DI TAHUN 1980

Rencana pergantian kepemimpinan RRC itu tampaknya telah dipersiapkan sejak lama. Pada pertengahan tahun 1979, Deng telah memberitahukan niatnya untuk mengundurkan diri dari pemerintahan. Demikian pula para calon pemimpin yang akan menggantikan generasi tua itu telah dipersiapkan. Ini terlihat dari pengangkatan kader-kader PKC yang lebih muda ke dalam Politbiro dan dalam kabinet RRC. Lebih jauh lagi, sebagian besar dari kader-kader PKC yang dipersiapkan untuk memimpin RRC di masa mendatang itu adalah pengikut Deng. Umumnya mereka juga korban Revolusi Kebudayaan yang telah direhabilitasi dalam Sidang-sidang Pleno Komite Sentral PKC yang ke-11. Dengan dikeluarkannya Wang Dongxing, Ji Dengkui, Cheng Xilian dan Wu De (keempatnya adalah "ahli waris" Revolusi Kebudayaan dan mempunyai hubungan erat dengan "Kawanan Empat") dari Politbiro Komite Sentral PKC pada awal tahun 1980, maka kelompok Deng dapat dikatakan telah memperoleh suatu kemenangan yang gemilang.¹ Keputusan-keputusan Sidang Pleno ke-3, ke-4 dan ke-5 Komite Sentral PKC yang ke-11 adalah sesuai dengan kehendak pribadi maupun kepentingan politis Deng. Keputusan Hua Guofeng untuk meletakkan jabatan dan menunjuk Wakil PM Zhao Ziyang sebagai penggantinya bukan tidak mungkin adalah atas desakan Deng. Walaupun Hua akan tetap memegang jabatan Ketua PKC, bukan tidak mungkin pula ia akan didesak untuk mengundurkan diri dari kedudukan itu dalam Kongres Nasional PKC ke-12 yang akan diselenggarakan pada akhir tahun 1980. Ada dugaan bahwa Deng Xiaoping akan mengambil alih jabatan Ketua PKC itu. Apabila hal itu benar, maka pernyataan-pernyataan Deng bahwa ia akan mengundurkan diri dari pemerintahan dan hanya akan bertindak sebagai penasehat partai hanyalah taktik saja untuk memenuhi ambisi pribadinya. Kemungkinan lain adalah mengorbitkan Hu Yaobang sebagai Ketua PKC sebagaimana Zhao Ziyang diorbitkan sebagai PM. Tetapi, hal itu jelas akan

1. Chang Chen-pang, "The Fifth Plenum of the Eleventh CCP Central Committee: An Analysis", *Issues & Studies*, Vol. XVI, No. 4, April 1980, hal. 14

mendapat tentangan dari banyak pihak, karena Hu berusia lebih tua dari Hua, sehingga apabila ia diangkat menggantikan Hua dengan alasan "peremajaan" PKC alasan itu tidak tepat. Di samping itu, prestasi Hu sebagai anggota PKC tidak menonjol, sedangkan Hua dianggap telah berjasa menjatuhkan "Kawan Empat".

Maka, adalah sulit untuk mengganti Hua dalam PKC, kecuali apabila Deng sendiri yang menggantikannya. Salah satu kemungkinan lain adalah membiarkan Hua menjabat Ketua PKC itu sampai masa kepengurusan yang berikutnya, barulah menggantinya dengan orang lain. Dengan adanya usaha pemisahan kekuasaan antara partai dan pemerintahan, jabatan Ketua PKC itu tidak mempunyai kekuatan politik yang berarti. Di samping itu, Politbiro Komite Sentral PKC telah dikuasai oleh kelompok Deng. Dengan demikian, tidak perlu dikuatirkan munculnya tokoh-tokoh seperti Mao Zedong.

Menjelang akhir tahun 1980 timbullah desas-desus bahwa Hua Guofeng telah ditangkap dan dikenakan tahanan rumah. Desas-desus ini timbul akibat tidak munculnya Hua dalam berbagai acara resmi dalam rangka menyambut para tamu negara. Timbulnya desas-desus tentang penangkapan dan penahanan Hua itu bersamaan dengan timbulnya desas-desus bahwa PKC merencanakan untuk mengganti Hua dengan Hu Yaobang sebagai Ketua PKC dalam sidang lengkap PKC yang ke-12 yang akan diselenggarakan pada pertengahan tahun 1981 ini. Desas-desus itu dibantah oleh pimpinan PKC yang mengatakan bahwa Hua tidak ditangkap dan masih tetap memegang jabatan Ketua PKC. Pada awal Januari 1981 Huapun muncul kembali dalam acara-acara resmi menyambut tamu-tamu negara.

Pengadilan "Kawan Empat", meskipun sudah diatur sedemikian rupa sehingga tidak terlalu mendiskreditkan Mao Zedong, juga mempunyai pengaruh yang besar terhadap perebutan kekuasaan di RRC dewasa ini. Bersamaan dengan diselenggarakannya pengadilan tersebut berbagai kritik dan kecaman yang keras dilontarkan terhadap Hua baik melalui media-media resmi maupun melalui poster dan selebaran gelap. Peranan Hua sebagai Menteri Keamanan Umum yang bertanggung jawab dalam penanggulangan insiden Tien An Men pada tahun 1976 merupakan salah satu topik yang cukup banyak dipermasalahkan, seperti diketahui, Deng adalah salah satu korban politis dalam insiden tersebut. Maka, terlihat bahwa usaha-usaha untuk mendiskreditkan Hua itu erat sekali hubungannya dengan perebutan kekuasaan di RRC dewasa ini.

Dengan diberhentikan atau dikeluarkannya tokoh-tokoh Maois yang merupakan kelompok "ahli waris" Revolusi Kebudayaan baik dari jabatan-jabatan resmi di pemerintahan maupun dari Politbiro PKC, maka Hua sudah

tidak mempunyai kekuatan politis lagi. Apabila Hua kelak diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua PKC, maka tidak ada lagi unsur-unsur Maois yang berarti dalam pemerintahan RRC maupun dalam PKC. Dengan demikian kelompok Deng dapat menjalankan program modernisasi RRC sesuai dengan apa yang mereka inginkan.

III. PENGARUH PERGANTIAN KEPEMIMPINAN DALAM POLITIK DALAM NEGERI RRC

Pergantian kepemimpinan ini jelas akan membawa banyak perubahan di dalam negeri RRC. Program modernisasi, perubahan struktur politik dan usaha deMaoisasi jelas akan lebih digalakkan. Rencana kelompok Deng untuk menghapuskan "Empat Besar" dari Konstitusi RRC adalah suatu masalah yang cukup serius.¹ "Empat Besar" dalam Konstitusi RRC adalah hak untuk "berbicara dengan bebas, mengemukakan pendapat dengan sepenuhnya, mengadakan perdebatan besar, dan menulis poster-poster besar". Penghapusan "Empat Besar" ini terpaksa dilakukan karena "Empat Besar" ini merupakan alat yang paling efektif dalam menjatuhkan kepemimpinan. Ini terbukti dalam Revolusi Kebudayaan, insiden Tien An Men, dan jatuhnya "Kawanan Empat". Untuk mencegah penyalahgunaan ke empat hak demokrasi itu dalam perebutan kekuasaan, maka tidak ada jalan lain kecuali menghapuskannya dari Konstitusi. Ini erat hubungannya dengan usaha kelompok Deng menghadapi sisa-sisa pengikut Mao Zedong.

Rencana penghapusan "Empat Besar" ini timbul setelah beredarnya penerbitan-penerbitan gelap yang isinya menyerang kebijakan Partai Komunis dan munculnya corat-coret pada "dinding demokrasi" yang menuntut kebebasan, demokrasi dan hak asasi manusia. Untuk mencegah tidak terkenalnya gerakan-gerakan itu Deng mengemukakan "Empat Kewajiban" yaitu "wajib mentaati jalan sosialisme, diktator proletariat, kepemimpinan Partai Komunis dan ajaran-ajaran Marx-Lenin-Mao". Sementara itu, Komite Revolusioner Kota Beijing mengumumkan "Enam Larangan" yang adalah sebagai berikut: pertemuan umum dan demonstrasi harus sesuai dengan petunjuk polisi dan tidak boleh mengganggu lalu lintas; tidak seorangpun diijinkan menimbulkan huru-hara dan menyebarkan desas-desus yang menyesatkan masyarakat; tidak dibenarkan menghentikan kendaraan; dilarang menempelkan poster, slogan dan surat kabar dinding di tempat-tempat umum kecuali di tempat yang telah ditentukan untuk keperluan itu; slogan, poster-poster besar, penerbitan dan photo-photo yang menentang

1 Chang Chen-pang, "Chinese Communist Ready to Eliminate the 'Four Great'", *Issues & Studies*. Vol. XVII, No. 4, April 1980, hal. 1

sosialisme, diktator proletariat, kepemimpinan partai, dan ajaran Marx-Lenin-Mao, dan yang membocorkan rahasia negara serta bertentangan dengan Konstitusi dan hukum adalah dilarang.¹

Dengan membatasi kebebasan rakyat ini kelihatannya kelompok Deng ingin mengamankan terlaksananya program modernisasi RRC. Usaha pemisahan kekuasaan antara partai dan pemerintahan serta pengangkatan Zhao Ziyang sebagai PM juga ada kaitannya dengan pengamanan pelaksanaan program modernisasi itu. Sebagai salah satu pengikut Deng yang paling setia, Zhao diharapkan dapat mewujudkan cita-cita Deng yaitu tumbuhnya RRC menjadi suatu negara sosialis modern yang kuat di masa mendatang tanpa terhambat oleh campur tangan partai dan gejolak-gejolak politik akibat penyalahgunaan hak demokrasi. Dalam pidatonya pada Sidang ke-3 KRN ke-5, PM Hua sendiri mengakui bahwa ketinggalan RRC dalam pembangunan ekonomi adalah karena kesalahan-kesalahan Mao yang terlalu banyak mencampuri urusan pemerintahan. Maka, dengan adanya perubahan struktur politik dan pergantian kepemimpinan ini diharapkan RRC dapat mengejar ketinggalan-ketinggalannya itu.

IV. PENGARUH PERGANTIAN KEPEMIMPINAN DI RRC TERHADAP POLITIK INTERNASIONAL

Persaingan ideologis dengan Uni Soviet adalah salah satu masalah yang utama dalam politik luar negeri RRC, sehingga politik luar negeri RRC lebih ditekankan pada usaha untuk mengimbangi pengaruh dan kedudukan Uni Soviet di negara-negara yang berbatasan dengan RRC pada khususnya dan di negara-negara Dunia Ketiga pada umumnya. Dalam rangka mengimbangi pengaruh Uni Soviet itu pulalah RRC menjalankan politik muka duanya, yaitu menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara lain sementara mendukung gerakan-gerakan "kemerdekaan nasional" (pemberontakan Komunis) di negara-negara yang bersangkutan. Itulah sebabnya beberapa negara di Asia masih ragu-ragu untuk menjalin hubungan diplomatik dengan RRC. Meskipun RRC berulang-ulang mengemukakan doktrin ko-eksistensi damai dan anti-hegemoni, hal itu tidak merupakan jaminan yang dapat dipercaya.

Pergantian kepemimpinan di RRC ini kelihatannya tidak akan mempunyai pengaruh yang besar dalam percaturan politik internasional. Para pemimpin RRC yang baru ini tampaknya tidak akan mengadakan perubahan-perubahan yang berarti dalam politik luar negeri RRC. Kepentingan dasar nasional (*basic*

¹ *Ibid.*, hal. 2-3

national interests) RRC tidaklah berubah, sehingga politik luar negeri RRC tidak akan menyimpang jauh dari taktik dan strategi yang telah digariskan oleh Mao dan Zhou dan dikokohkan dalam konstitusi baru yang disahkan pada bulan Maret 1978. Kemungkinan besar, dengan lebih ditekankannya program modernisasi, hubungan kerja antara RRC dan negara-negara Barat akan semakin erat, karena RRC membutuhkan bantuan dari negara-negara Barat terutama di bidang pertahanan, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagi negara-negara Asia, terutama bagi negara-negara Asia Tenggara, pergantian kepemimpinan di RRC ini tampaknya akan membawa sedikit perubahan dalam politik luar negeri RRC terhadap mereka. Baru-baru ini Pemerintah RRC menyatakan akan menghentikan bantuannya terhadap gerakan-gerakan Komunis di Asia Tenggara, meskipun secara moral RRC akan tetap mendukung gerakan-gerakan tersebut. Masalah-masalah "orang Cina perantauan" (*Overseas Chinese*) yang selama ini sering menjadi hambatan bagi negara-negara tertentu di Asia Tenggara untuk menjalin atau menormalisasi hubungan diplomatiknya dengan RRC tampaknya akan dapat diselesaikan dengan baik sehubungan dengan diberlakukannya Undang-undang Kewarganegaraan Cina yang baru setelah Sidang ke-3 Kongres Rakyat Nasional ke-5 yang diselenggarakan pada bulan September 1980 yang lalu. Perkembangan-perkembangan ini menunjukkan bahwa RRC bermaksud untuk memperlihatkan iktikad baiknya untuk menjalin hubungan dengan negara-negara Asia lainnya terutama dalam persaingan pengaruh dengan Uni Soviet.

PENUTUP

Setelah mempelajari latar belakang perebutan kekuasaan di RRC sejak sebelum meninggalnya Mao Zedong, maka dapat dikatakan bahwa pergantian kepemimpinan yang baru terjadi di RRC ini merupakan kemenangan bagi kelompok moderat atas kelompok Maois yang radikal. Keberhasilan Deng Xiaoping dalam menyingkirkan para pengikut Mao dari pemerintahan maupun dalam kepengurusan PKC merupakan jaminan bagi terlaksananya program modernisasi yang tengah digalakkan di RRC. Perubahan struktur politik di mana kekuasaan partai dipisahkan dari kekuasaan pemerintah, seperti yang telah diputuskan oleh Sidang ke-3 Kongres Rakyat Nasional ke-5 itu, adalah untuk mencegah campur tangan partai dalam urusan pemerintahan. Deng dan para pengikutnya tidak menginginkan terulangnya kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Mao Zedong. Peranan pribadi Mao dalam urusan pemerintahan di masa lalu terbukti telah menyebabkan terhambatnya pembangunan di negara itu.

Untuk memperkuat kedudukan mereka, kelompok Deng juga telah berusaha mengubah Konstitusi, yaitu dengan menghapuskan empat hak demokrasi yang terbukti paling efektif dalam menjatuhkan kepemimpinan. Usaha kelompok Deng untuk melaksanakan deMaoisasi politik dan sejarah RRC sebagai salah satu usaha lain untuk memperkuat kedudukan mereka telah mendapat tentangan dari kelompok netral yang menginginkan terlaksananya program modernisasi itu di bawah panji-panji Maoisme. Hal ini terlihat dalam proses pengadilan "Kawan Empat" yang diatur sedemikian rupa sehingga tidak melibatkan atau mendiskreditkan Mao. Walaupun demikian, kelompok Deng tampaknya berhasil memperkuat kedudukan mereka terutama dengan berhasilnya mereka mengeluarkan para pengikut Mao dari pemerintahan maupun dari partai.

Pergantian kepemimpinan di RRC ini kelihatannya tidak akan mempunyai pengaruh yang besar dalam percaturan politik internasional. Seperti telah dikatakan di atas, dalam pelaksanaan politik luar negerinya, RRC akan lebih menekankan pada usaha untuk mengimbangi pengaruh dan kedudukan Uni Soviet di negara-negara yang berbatasan dengan RRC pada khususnya dan di negara-negara Dunia Ketiga pada umumnya. Maka, RRC akan tetap berpegang pada taktik dan strategi yang dirumuskan dalam Konstitusi 1978 dan akan lebih menekankan kepentingan nasional daripada sikap revolusioner Maois. Adapun perkembangan selanjutnya akan bergantung pada perubahan-perubahan keadaan yang sering tidak terduga, dan masih harus diamati dan dikaji dengan seksama.

BHAKTI - DHARMA - WASPADA

MU KEPOLISIAN